



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

SEKRETARIAT DPRD

Jalan Jendral Sudirman KM. 9 No. 100, Sanggau, Kalimantan Barat,
Telepon (0564) 21049, Faksimile (0564) 2020942, Kode Pos 78511,
Laman : <http://dprd.sanggau.go.id>, Pos-el : dprd@mail.sanggau.go.id

KEPUTUSAN

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU**

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SANGGAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Sanggau tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyusuaian Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Sanggau Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15/9949/Keuda Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan nama-nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026, sebagaimana lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Masa tugas jabatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana Diktum KESATU adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran;
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas sebagaimana Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- 1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA).
 - 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, meliputi:
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 - 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa;
 - 4. Dalam melaksanakan tugasnya PPTK pada Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA).
- KEEMPAT : Biaya pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
Pada Tanggal 9 Januari 2026

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SANGGAU**
IGNATIUS PRIANTO, S.Sos., M.Si.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19681113 198903 1 003

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Sanggau
Nomor : 9 Tahun 2026
Tanggal : 9 Januari 2026
Tentang : Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026.

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	HUBERTUS LEYDIN, SAP. M.Sc NIP. 19711103 199201 1 001 Pembina (IV/b)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bagian Umum dan Keuangan Set-DPRD	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 42.784.627.943,30 Rp. 91.602.883,20 Rp. 20.408.415,60 Rp. 10.729.626,30 Rp. 10.886.025,30 Rp. 20.000.424,00 Rp. 21.044.157,00 Rp. 8.534.235,00 Rp. 7.497.582.603,00 Rp. 4.726.115.684,00 Rp. 2.406.078.429,00 Rp. 211.556.055,00 Rp. 9.996.138,30

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
			5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD III. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan V. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 143.836.297,50 Rp. 120.766.324,00 Rp. 8.185.284,30 Rp. 85.822.960,00 Rp. 6.414.501,30 Rp. 20.343.578,40 Rp. 300.180.895,00 Rp. 70.762.500,00 Rp. 73.592.334,00 Rp. 41.540.195,00 Rp. 114.285.866,00 Rp. 3.153.496.701,00 Rp. 456.820.500,00 Rp. 437.621.940,00 Rp. 14.498.265,00 Rp. 531.358.500,00

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7. Fasilitas Kunjungan Tamu 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya VII. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor VIII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 702.985.200,00 Rp. 377.832.081,00 Rp. 382.237.215,00 Rp. 250.143.000,00 Rp. 423.240.780,00 Rp. 46.203.750,00 Rp. 377.037.030,00 Rp. 2.086.310.120,80 Rp. 3.595.401,00 Rp. 439.366.200,00 Rp. 1.643.384.519,80 Rp. 1.064.502.487,45 Rp. 317.780.000,00 Rp. 132.608.000,00 Rp. 614.114.487,45

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
			IX. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 3. Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD X. Layanan Administrasi DPRD 1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 2. Fasilitasi Fraksi DPRD 3. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 4. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Rp. 25.502.285.885,00 Rp. 25.118.060.273,00 Rp. 333.103.452,00 Rp. 51.122.160,00 Rp. 2.544.659.263,05 Rp. 30.672.186,00 Rp. 322.558.536,00 Rp. 272.506.636,05 Rp. 1.918.921.905,00
2.	P. HERYANTO DIDI, SH NIP.19760119 200604 1 016 Pembina (IV/b)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bagian Persidangan & Perundang-undangan Set-DPRD	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN I. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 4. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 5. Penyusunan Tata Tertib DPRD II. Peningkatan Kapasitas DPRD 1. Pendalaman Tugas DPRD 2. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 3. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 4. Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp. 5.541.369.528,00 Rp. 1.399.824.300,00 Rp. 423.180.018,00 Rp. 245.595.228,00 Rp. 244.946.268,00 Rp. 412.455.618,00 Rp. 73.647.168,00 Rp. 2.412.330.048,00 Rp. 656.588.908,00 Rp. 551.000.367,00 Rp. 321.852.666,00 Rp. 231.249.589,00

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
			5. Publikasi dan Dokumentasi DPRD III. Fasilitasi Tugas DPRD 1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 4. Fasilitasi Tugas Pimpinan 5. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Rp. 651.638.518,00 Rp. 1.729.215.180,00 Rp. 62.777.301,00 Rp. 53.989.331,00 Rp. 209.889.355,00 Rp. 336.056.725,00 Rp. 1.066.502.468,00
3.	<u>HIRONIMUS BANUEL, S.Sos</u> NIP.19760402 200312 1 007 Pembina (IV/b)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Set-DPRD	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN I. Pembahasan Kebijakan Anggaran 1. Pembahasan KUA dan PPAS 2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 3. Pembahasan APBD 4. Pembahasan APBD Perubahan 5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD II. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp. 10.378.739.595,00 Rp. 731.526.498,00 Rp. 98.966.293,00 Rp. 98.228.643,00 Rp. 299.074.166,00 Rp. 105.390.280,00 Rp. 129.867.116,00 Rp. 2.239.982.286,00 Rp. 494.231.940,00 Rp. 548.178.090,00 Rp. 497.376.675,00

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
			4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rp. 577.500.565,00
			5. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Rp. 49.253.778,00
			6. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rp. 73.441.238,00
			III. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp. 7.344.096.105,00
			1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp. 100.633.916,00
			2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rp. 68.664.750,00
			3. Pelaksanaan Rcses	Rp. 7.174.797.439,00
			IV. Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD	Rp. 63.134.706,00
			1. Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp. 63.134.706,00

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SANGGAU

